**IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI**

**Abstrak**

**Feggy Lestari**

Pendidikan tinggi merupakan salah satu jenjang pendidikan yang memiliki peran penting dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia. Dalam menunjang pendidikan ke arah yang lebih baik pendidikan tinggi harus memiliki kurikulum yang bisa menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia khususnya. Tercapainya tujuan kurikulun didukung oleh Sistem pendidikan tinggi, hal ini dapat dilihat sebagai sebuah proses akan memiliki empat tahapan pokok yaitu (1) masukan (input), yaitu Dosen, mahasiswa, dsb, (2) Proses (proces) yaitu proses pembelajaran, proses penelitian dan proses manajemen , (3) Luaran (out put) yaitu lulusan, hasil penelitian dan karya IPTEK lainnya, dan (4) Hasil Ikutan ( outcome) yaitu penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap luaran perguruan tinggi, kesinambungan, peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat dan lingkungan. Kurikulum pendidikan tinggi harus mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dimana sistem ini terdiri dari input, proses, output, dan outcome. Input terdiri dari mahasiswa, dosen, dan fasilitas. Proses terdiri dari kurikulum, kegiatan belajar mengajar, administrasi dan penilaian. Output terdiri lulusan dengan kompetensi tertentu, dan produk penelitian serta pengembangan. Outcome merupakan dampak lulusan dan produk perguruan tinggi terhadap lingkungan lokal, nasional, regional maupun internasional. Impelementasi kurikulum oleh pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang bermutu dan relevan dengan pembangunan nasional termasuk kebutuhan tenaga terdidik dan terampil di dunia industri.

Kata kunci: Pendidikan tinggi, tujuan kurikulum, KKNI, implementasi kurikulum

**Pendahuluan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Latar Belakang**   Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang memiliki peran signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat yang sejahtera. Menurut UU No. 12 tahun 2012 bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Pendidikan dan yang dapat menghasilkan lulusan yang dibutuhkan oleh pasar kerja, program-program studi yang berkualitas dan lain-lain dalam menghadapi persaingan antar perguruan tinggi baik secara nasional maupun internasional. Dalam meningkatkan daya saing bangsa juga tertuang dalam UU No. 12 tahun 2012 bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuan, dan/atau professional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.  Salah satu aspek yang penting yang dapat menunjang keberhasilan pendidikan tinggi adalah kurikulum. Hilda Taba dalam Arifin (2011:6) menjelaskan bahwa *a curriculum is plan for learning,* dan implementasi dari kutipan ini adalah 1) kurikulum harus memiliki rencana yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengembangan siswa pada semua jenis dan jenjang pendidikan, 2) menggambarkan anatomi kurikulum yang terdiri tujuan, isi, materi, metode, dan evaluasi. Kurikulum juga menggambarkan berbagai kegiatan pembelajaran, 3) kurikulum harus ada hasil sesuai dengan tujuan pendidikan. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Makalah studi pengembangan kurikulum di sekolah pasca sarjana UPI.  **C.Manfaat Penulisan Makalah**  Makalah ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan diskusi bagi mahasiswa, praktisi, maupun akademisi yang berkepentingan dalam bidang implementasi kurikulum.  .**BAB II**  **Kajian Pustaka**   1. **Peranan Kurikulum di dalam Sistem Pendidikan Tinggi**   Didalam pendidikan tinggi kurikulum memiliki peranan yang sangat penting. Menurut UU Dikti no 12/2012 pasal 35 kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Sedangkan menurut kemendiknas No. 232/U/2000, didefinisikan sebagai berikut: “Kurikulum pendidikan tinggi adalah rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiaan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar diperguruan tinggi.”  Kurikulum adalah sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah program yang berupa dokumen dan pelaksanaan program.  luaran perguruan tinggi, kesinambungan, peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat dan lingkungan.  Disisi lain, sistem yang baik didukung oleh beberapa unsur yang baik pula sehingga terdapat berbagai macam kategori yaitu berupa: (1) organisasi yang sehat, (2) pengelolaan yang transparan, (3) ketersediaan rencana pembelajaran dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, (4) kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia dibidang akademik dan non akademik yang handal dan profesional, (5) ketersediaan sarana dan prasarana dan fasilitas belajar yang memadai, serta lingkungan akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang profesional (Tresno Dermawan Kunaefi, at al, 2008).   1. **Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Mengacu pada KKNI**   Sistem pendidikan terdiri dari input, proses, output, dan outcome. Input terdiri dari mahasiswa, dosen, dan fasilitas. Proses terdiri dari kurikulum, kegiatan belajar mengajar, administrasi dan penilaian. Output terdiri lulusan dengan kompetensi tertentu, dan produk penelitian serta pengembangan. Outcome merupakan dampak lulusan dan produk perguruan tinggi terhadap lingkungan lokal, nasional, regional maupun internasional. Implementasi kebijakan pengembangan kurikulum di perguruan tinggi sudah berjalan sesuai dengan konsep yang  kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.  KKNI mempunyai 9 level, mulai dari level 1 (pendidikan dasar) hingga level 9 (Strata 3 / S-3). Tiap level harus benar-benar sesuai dengan levelnya, dalam arti tidak boleh level 6 (S-1) merasakan level 8 (S-2). Dalam kata lain, tidak diperbolehkan S-1 berasa S-2 dan sebagainya. Adapun keterangan tiap levelnya adalah sebagai berikut:  Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya. Berdasarkan pemahaman kompetensi diatas tentunya kurikulum perguruan tinggi harus mampu mengasah  pengaturan mengenai tujuan, isi dapn bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Ditjen Belmawa (2016) selain menyampaikan pemahaman KPT, juga memberikan arahan mengenai penerapan KPT pada workshop yang dilaksanakan di Hotel Best Western Jakarta pada tanggal 8-9 April 2016 yang dihadiri oleh 102 Perguruan Tinggi, dimana masing-masing PT diwakili oleh 1 orang tim pengembangan KPT menjelaskan bahwa KPT dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan berorientasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Ditjen Belmawa yang pada tahun 2016 telah merancang sejumlah program terkait dengan pengembangan dan penerapan KPT di Perguruan Tinggi. Penerapan KPT tersebut diharapkan dapat menghasilkan lulusan-lusan yang bermutu dan relevan dengan pembangunan nasional termasuk kebutuhan tenaga terdidik dan terampil di dunia industri.  **BAB III**  **Pembahasan**   1. **Mengapa Kurikulum Mengalami Perubahan**   Konsep kurikulum yang tercantum dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2000 banyak didorong oleh permasalahan Global ataupun eksternal. menurut UNESCO (dalam Leo Agung, 2010)  hal-hal tersebut menimbulkan keadaan seperti:  sendiri. Peran DIKTI berubah yaitu hanyamemfasilitasi, memberdayakan, dan mendorong perguruan tinggi untuk mencapai tujuannya, jadi tidak lagi berperan sebagi penentu atau regulator seperti masa-masa sebelumnya. Secara konseptual dipisahkan antar pengembangan kelembagaan dan pengembangan kurikulum/isi pendidikannya, sehingga perguruan tiggi lebih bisa mengembangkan dirinya sehingga sesuai dengan kemampuan dan tujuan yang dicapai. Sangat kemungkinan perubahan kurikulum disebabkan juga oleh adanya peruban rencana strategis perguruan tinggi yang termuat dalam visi dan misi.  Perubahan yang sangat pesat dan cepat disemua sektor kehidupan khususnya dunia kerja, mendorong perguruan tinggi perlu membekali lulusannya dengan kemampuan adaptasi dan kreativitas agar dapat mengikuti perubahan dan perkembangan  yang cepat tersebut. Alasan inilah yang mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan perubahan paradigma dalam penyusunan kurikulumnya. Tidak hanya memfokuskan pada isi yang harus dipelajari, akan tetapi akan menitik beratkan pada kemampuan apa yang harus dimiliki lulusannya sehingga dapat menghadapi kehidupan masa depan dengan lebih baik serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Konsep kurikulum yang didasarkan pada empat pilar pendidikan dari UNESCO , merupakan pengubahan orientasi kurikulum secara mendasar. Yaitu dari sebelumnya yang berfokus pada kemampuan manusia di masyarakatnya, lebih luas lagi yaitu pada kebudayaannya.  tersusun atas kurikulum nasional ( Kurnas) dan kurikulum Lokal  (Kurlok) disusun dengan tujuan untuk menguasai isi ilmu pengetahuan dan penerapannya (conten Based), sedangkan dalam Kemendiknas No. 232/U/2000 kurikulum terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum inti merupakan penciri dari kopetensi utama, ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Sedangkan kompetensi pendukung dan kopetensi lain yang bersifat khusus dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi pennyelenggara program studi (Kemendiknas No.045/U/2000).  d. Dalam  Kemendiknas No. 232/U/2000, kurikulum terdiri dari kelompok-kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB).  Akan tetapi dikatan dalam Kemendiknas N0. 045/U/2002, pengelompokan mata kuliah tersebut diluruskan agar maknanya agar lebih luas dan tepat melalui pengelompokan berdasarkan elemen  kompetensinya, yaitu berupa: (a) landasan kepribadian, ( b) penguasaan ilmu dan ketrampilan, (c) kemampuan berkarya, (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai, (e) pemahaman kaidah kehidupan  2. Penyusunan profil lulusan, yaitu berupas peran dan fungsi yang diharapkan dapat dijalankan oleh lulusan nantinya dimasyarakat.  3  Penetapan kompetensi berdasarkan profil lulusan yang telah dirancangkan.  4.Penentuan bahan kajian yang terkait dengan bidang IPTEK program studi.  5. Penetapan kedalam dan keluasan kajian (sks) yang dilakukan dengan menganalisis hubungan antara kompetensi dan bahan kajian yang diperlukan.  6. Merangkai berbagai macam kajian tersebut ke dalam mata kuliah.  7.  Menyususn struktur kurikulum dengan  cara mendistribusikan mata kuliah tersebut dalam semester.  8.  Mengembangkan rancanagan pembelajaran secara simultan  9.  Memilih metode pembelajaran yang tepast untuk mencapai kompetensi.  Pengembangan kurikulum memiliki pengertian yang luas, yakni meliputi perencanaan, penerapan dan evaluasi. Pengembangan kurikulum sering memiliki arti yang sama dengan pengembangan kurikulum, walaupun dalam beberapa hal perbaikan dianggap sebagai akibat dari pengembangan. Perencanaan kurikulum merupakan fase pendahuluan dari pengembangan yakni langkah-langkah menetapkan rencana yang akan dijalankan oleh guru dan siswa. Penerapan kurikulum rencana dalam tindakan, dan evaluasi kurikulum adalah penilaian terhadap pelaksanaan tindakan (Olivia, 1982) ada beberapa pemikiran (ide yang diterima atau yang diusulkan sebagai kebenaran ) yakni sebagai berikut:  Program Studi adalah dengan menentukan kebijakan/garis-garis besar dalam penyusunan kurikulum yang dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum, meliputi:   1. Kebutuhan pemangku   kepentingan (stakeholder)  2.  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  3.  Kompetensi yang diharapkan dari lulusan  Landasan/Tinjauan Kurikulum Nana Syaodih Sukmadinata, (1997) mengemukakan adanya empat landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu:  (1) filosofis, (2) psikologis, (3) sosial budaya, dan (4) ilmu pengetahuan dan teknologi.  Prinsip Pengembangan Kurikulum, Menurut Wina Sanjaya (dalam Leo Agung, 2010) terdapat lima prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu:  a.  Prinsip Relevansi, secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi diantara komponen-komponen kurikulum(tujuan, bahan, strategi, organisasi dan evaluasi). Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistimoilogis), tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyaraka (relevansi sosiologis).  b.  Prinsip fleksibilitas, dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-  tertentu pasti mengalami perubahan, dan ini merupakan sesuatu yang wajar guna mengikuti perkembangan IPTEK dan tuntutan dunia kerja.  **DAFTAR PUSTAKA**  Arifin, Zainal. 2011. Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.  *Ditjen Belmawa Kemenristekdikti Dorong Terwujudnya Penerapan KurikulumPendidikan Tinggi (KPT) Berbasis SN Dikti dan KKNI di seluruh Perguruan Tinggi.* Terdapat pada |  | memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.  Namun, perguruan tinggi harus memperhatikan aspek-aspek didalamnya dimulai dari legalitas lembaga, sarana dan prasaran, SDM baik dosen maupun karyawan, sistem akademik yang terorganisasi dengan baik, memiliki kurikulum dengan capaian pembelajaran yang terpenuhi pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi sesuai yang tertera pada UU No.12 tahun 2012 pasal 5 tentang tujuan pendidikan tinggi. Tercapainya tujuan pendidikan tinggi tentunya diharapkan dapat mengatasi problema masyarakat dalam menghadapi tuntutan global dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.   1. **Rumusan Masalah**   Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang di dapat adalah,   1. Bagaimanakah peranan kurikulum di dalam sistem Pendidikan Tinggi? 2. Apakah yang dimaksud dengan implementasi kurikulum di Pendidikan Tinggi? 3. Mengapa kurikulum berubah? 4. **Tujuan Penulisan Makalah**   Tujuan dari penulisan makalah ini secara umum adalah untuk mengkaji mengenai implementasi kurikulum di pendidikan tinggi, konsep pengembangan kurikulum dan mengapa kurikulum berubah.  Secara khusus, makalah ini disusun sebagai pemenuhan tugas dan bahan diskusi dalam mata kuliah implementasi  Sebagai sebuah dokumen kurikulum (curriculum plan) dirupakan dalam bentuk rincian, mata kuliah, silabus, rancangan pembelajaran, sistem evaluasi keberhasilan. Sedang kurikulum sebagai sebuah pelaksanaan program adalah bentuk pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan (actual curriculum).  Akan tetapi dengan cara pandang yang luas kurikulum bisa berperan sebagai (1) manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya, (2) filosofis yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik, (3) Patron atau pola pembelajaran, (4) atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajaran, (5) Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu, serta (6) ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan kelulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan ukuran bahwa kurikulum tidak hanya berarti sebagai sesuatu dokumen saja, namun mempunyai peran yang kompleks dalam proses pendidikan. (Kunaefi, Tresno Dermawan at al, 2008: 4-5).  Tercapainya tujuan kurikulun didukung oleh Sistem pendidikan tinggi, hal ini dapat dilihat sebagai sebuah proses akan memiliki empat tahapan pokok yaitu (1) masukan (input), yaitu Dosen, mahasiswa, dsb , (2) Proses (proces) yaitu proses pembelajaran, proses penelitian dan proses manajemen , (3) Luaran (out put) yaitu lulusan, hasil penelitian dan karya IPTEK lainnya, dan (4) Hasil Ikutan ( outcome) yaitu penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap.  direncanakan.  Manajemen kurikulum Perguruan Tinggi dalam mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang mengacu pada KKNI dalam meningkatkan mutu pendidikan yang secara umum dari hasil penelitian terdahulu dikatakan bahwa pengelolaan manajemen PT belum maksimal; kompetensi dosen dan mutu pembelajaran masih rendah. Berdasarkan alasan tersebut perlunya pengkajian lebih mendalam sejauh mana pelaksanaan manajemen yang dilakukan Perguruan Tinggi dalam upaya memberdayakan semua komponen lembaga pendidikan untuk menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi serta memperbaiki mutu pendidikan kearah yang lebih baik sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  KKNI adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang menjadi parameter mutu pendidikan tinggi. KKNI diatur secara khusus dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 8 tahun 2012. Namun, KKNI juga sering muncul dalam ketentuan umum peraturan menteri seperti halnya dalam Pemendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Dalam Permendikbud No. 49 tahun 2014 Bab I pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi  kompetensi mahasiswa sehingga tercipta lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.  Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan pembelajaran yang digunakan sebagai acuan pengembangan standar isi pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran   1. **Implementasi Kurikulum Pendidikan Tinggi**   Yang dimaksud dengan implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Di dalam makalah ini yang akan dibahas adalah implementasi kurikulum di pendidikan tinggi. Pressman dan Wildavsky (1973) menyatakan implementasi sebagai “...accomplishing, fulfilling, carrying out, producing and completing a policy”. Sedangkan Tornatzky dan Johnson (1982) membuat batasan tentang implementasi sebagai “....the translation of any tool, technique, process, or method of doing from knowledge to practice”. Berdasarkan sumber diatas yang dikutip Arifin 2011, impelementasi dapat diartikan sebagai penerapan apa yang telah ditetapkan sebagai bentuk proses pengajaran dan pembelajaran dari keilmuan sampai mempraktekannya.  Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana  1. Persaingan di dunia Global, yang mana berakibat juga terhadap persaingan perguruan tinggi didalam negeri maupun diluar negeri, sehingga perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dalam dunia global.  2.  Adanya perubahan orientasi pendidikan tinggi yang tidak lagi hanya menghasilkan manusia cerdas berilmu akan tetapi juga mampu menerapkan keilmuaannnya  dalam kehidupan dimasyarakatnya (kompeten dan relevan), yang lebih berbudaya.  3. Adanya perubahan kebutuhan didunia kerja yang terwujud dalam perubahan persyaratan dalam menerima tenaga kerja, yaitu dengan adanya persyaratan softskills yang dominan disamping hardskillnya. Sehingga kurikulum yang dikonsepkan lebih didasarkan pada rumusan kompetensi yang harus dicapai / dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi yang sesuai atau mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan/ stakeholders (competense based curiculum).  Tresno Dermawan Kunaefi, at al  (2008: 7) menyampaikan dengan detail bahwa perubahan ini juga didorong oleh adanaya perubahan-perubahan otonomi perguruan tinggi yang dijamin dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberi kelonggaran terhadap perguruan tinggi untuk menentukan dan mengembangkan kurikulum  **B.Pengembangan Konsep Kurikulum**  Pembahasan konsep kurikulum pendidikan tinggi yang dituangkan dalam kemendiknas No. 232/2000 dan  No. 045/2000, mengacu kepada konsep pendidikan tinggi abad XXI UNESCO (1998), Leo Agung (2010) terdapat perubahan mendasar yaitu:   1. Out Put hasil pendidikan yang semula berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum program studi, diganti dengan kopetensi seseorang untuk dapat melakukakn seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Out put dalam hasil pendidikan tinggi ini semula penilaiannnya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi sendiri , dalam konsep baru dalam penilaiaan selain oleh perguruan tinggi juga dilakukakn oleh masyarakat pemangku kepentingan. 2. Kurikulum program studi yang semula disusun dan ditetapkan oleh pemerintahan lewat sebuah konsersium (kurikulum nasional), diubah  dimana kurikulum inti disusun oleh pergurua tinggi bersama-sama. Dengan pemangku kepentingan dan kalangan profesi, dan ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. 3. Berdasarkan kemendikbud N0. 056/1994 kompenen kurikulum   bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya e.  Perubahan kurikulum juga berarti perubahan pembelajaran, sehingga denga konsep pembelajaran yang dilakukan di pendidikan tinggi tidak hanya sekedar suatu proses transfer of knowledge, namun benar-benar merupakan suatu proses pembekalan berupa method of inquiry seseorang yang berkopenten dalam berkarya di masyarakat. Dengan demikian secara jelas akan tampak bahwa perubahan kurikulum dari kurikulum berbasis penguasaan ilmu penengetahuan dan ketrampilan (KBI) sesuai dengan Kemendikbud No. 056/U/1994, ke KBK menurut Kemendiknas No. 2323/U/2000, mempunyai harapan keunggulan yaitu berupa: “luaran hasil pendidikan (outcomes) yang diharapkan sesuai dengan sociel needs, industrial/business needs, dan profesional needs, dengan pengertian bahwa outcomes merupakan kemampuan mengintegrasikan intelectual skill, knowledge dan afektif dalam sebuah perilaku secara utuh.”  Adapun alternatif penyusunan kurikulum berbasis kompetensi dapat dimulai dengan langkah langkah berikut :  1.  Penyusunan profil lulusan, yaitu berupas peran dan fungsi yang diharapkan dapat dijalankan oleh lulusan nantinya dimasyarakat.  2.  Penetapan kompetensi berdasarkan profil lulusan yang telah dirancangkan.  Perubahan itu tidak dapat dihindarkan dan penting, karena melalui perubahan itulah bentuk kehidupan tumbuh dan berkembang.  b.  Sebuah kurikulum tidak hanya merefleksikan, melainkan merupakan produk dari zamannya.  c.  Perubahan kurikulum yang terdahulu mungkin lebih baru dari periode sebelumnya.  d.  Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang terus menerus dan tiada akhir.  *e.*  Pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan sebuah proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini perancang kurikulum dihadapkan dalam berbagai pilihan, antara lain: (1) Pilihan disiplin ilmu, (2) Pilihan sudut pandang, (3) Pilihan tentang penekanan, (4) Pilihan metodelogis, (5) Pilihan dalam pengorganisasian. Tampaknya ada dua ciri yang diperlukan bagi seseorang perancang kurikulum, yakni berupa: (1) kemampuan untuk mempengaruhi keputusan setelah dilakukan suatu pengkajian suatu masalah, (2) kemauan untuk membuat keputusan. Perancang kurikulum dapat mengikuti saran dalam *Book Of Common Prayer* dimana para penganutnya diminta untuk “berpegang erat pada apa yang baik”.  Penyusunan dan pengembangan kurikulum untuk program studi yang dikelola Peran Fakultas dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum untuk  penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik.  c.  Prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal, maupun horisontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat  kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan.  d.  Prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dal;am pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai.  e.  Prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.   1. **PENUTUP**   Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan tinggi, sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang ingin di capai sehingga memperjelas visi dan misi Perguruan Tinggi, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kurikulum dalam kurun waktu. |
|  |  |  |